

ORIGINAL ARTICLES

KUALITAS HIDUP PEKERJA SEKSUAL PASCA PENUTUPAN LOKALISASI BALONGCANGKRING KOTA MOJOKERTO : STUDI KUALITATIF

1. Eko Agus Cahyono, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
 2. Oedojo Soedirham, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
 3. Ira Nurmala, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
- Korespondensi : ekoagusdianhusada@gmail.com

Abstract

Prostitusi merupakan masalah klasik di berbagai negara termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Berdasarkan kajian ilmiah yang banyak dilakukan oleh peneliti, praktik prostitusi memiliki pengaruh terhadap setiap kehidupan masyarakat dan para pekerja seksual di dalamnya. Untuk mengatasi dampak dari terjadinya prostitusi, Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2019. Praktik prostitusi pada dasarnya terjadi karena rendahnya kualitas hidup yang dimiliki oleh masyarakat. Kualitas hidup itu sendiri memiliki tiga domain utama yang terdiri dari kesejahteraan, kebebasan dan partisipasi sosial. Ketidakmampuan individu untuk memenuhi salah satu komponen akan beresiko memicu munculnya perilaku negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi dilakukan penutupan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenology. Partisipan penelitian dipilih dari pekerja seksual yang pernah berada di lokalisasi balongcangkring kota Mojokerto yang memenuhi kriteria penelitian. Dari hasil pemilihan partisipan didapatkan 16 partisipan yang bersedia untuk dilakukan interview. Instrumen penelitian disusun peneliti mengacu kepada dimensi kualitas hidup manusia. Hasil analisa data didapatkan tiga dimensi yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia yang dianggap bermakna oleh informan dalam penelitian ini yaitu : 1) Kesejahteraan, 2) Kebebasan, dan 3) Partisipasi sosial. Informan dalam penelitian ini cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang negatif namun pada dimensi kesejahteraan fisik, penutupan lokalisasi memunculkan dampak yang positif pada diri informan. Informan mengaku memiliki banyak waktu yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas fisik, dan kegiatan rutin. Hal ini menjadikan kondisi kesehatan informan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi kesehatan sebelum lokalisasi dilakukan penutupan. Penutupan lokalisasi sama artinya dengan menghilangkan peluang bagi pekerja seksual untuk bisa bekerja dan mampu mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini juga berarti menghilangkan sesuatu hal yang menyenangkan bagi beberapa orang terutama pelanggan jasa pekerja seksual. Untuk memastikan penutupan lokalisasi sesuai dengan harapan, maka pemangku kebijakan harus menggantikan hal yang serupa untuk menggantikan praktik prostitusi dimana setiap person yang terlibat didalamnya masih tetap dapat bekerja dan menghasilkan uang.

Keywords : Kualitas Hidup, Pekerja Seksual, Penutupan Lokalisasi

1. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai peranan besar dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan penduduk [1]. Menurut World Health Organization sehat merupakan suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Hal ini secara analogi kesehatan, dapat didefinisikan bukan hanya sekedar bebas dari gangguan tetapi lebih kepada perasaan sehat, sejahtera dan bahagia, ada keserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, dapat merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar kehidupannya serta mampu mengatasi tantangan hidup [2].

Salah satu ancaman kesehatan yang berada di lingkungan masyarakat adalah adanya praktik prostitusi yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Prostitusi merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat [3]. Praktik prostitusi yang dilakukan oleh anggota masyarakat memiliki potensi untuk menyebarkan penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, siphilis, atau penyakit kelamin lainnya. Selain itu praktik prostitusi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi termasuk dalam hal ini adalah ibu rumah tangga, remaja dan anak usia sekolah. Hal negatif yang dapat terjadi akibat adanya lokalisasi adalah terpaparnya anak usia sekolah dengan kebiasaan dan aktivitas yang dilakukan di lokalisasi itu sendiri [4].

Sebagai upaya nyata dari pemerintah Indonesia guna mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya prostitusi, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia mencetuskan program Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2019. Target kinerja ini digagas sebagai salah satu upaya untuk menurunkan resiko negatif yang dapat dialami masyarakat akibat adanya praktik prostitusi. Salah satu lokalisasi yang dilakukan penutupan adalah lokalisasi balongcangkring yang berada di wilayah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Penutupan lokalisasi balongcangkring ini merupakan bentuk kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto sebagai bagian dari pencapaian target kinerja yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. pada bulan Mei 2016, lokalisasi balongcangkring secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Mojokerto [5].

Penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto, tidak secara langsung mampu menghilangkan praktik prostitusi yang dilakukan oleh para pekerja seksual. Setelah lokalisasi balongcangkring yang berada di wilayah Kota Mojokerto dilakukan penutupan, maka praktik prostitusi yang selama ini terjadi di satu wilayah dapat dihilangkan. Namun dalam perkembangannya, para pekerja seksual mulai melakukan praktik prostitusi secara ilegal. Praktik prostitusi tetap terjadi dan dilakukan pada beberapa tempat di Kota Mojokerto seperti hotel, cafe, tempat karaoke dan beberapa tempat hiburan lainnya. Saat lokalisasi balongcangkring masih aktif, aktivitas prostitusi yang dilakukan oleh para mucikari dan pekerja seksual menggunakan transaksi secara langsung. Namun setelah lokalisasi balongcangkring ditutup, para pelaku praktik prostitusi mulai beralih menggunakan media komunikasi dan teknologi untuk melakukan praktik prostitusi [6].

Kesehatan yang dimiliki individu identik dengan kualitas hidup yang dimiliki oleh individu tersebut. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu termasuk dalam hal ini adalah pekerja seksual merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan kualitas hidup yang optimal. Bagi sebagian besar masyarakat

yang memiliki tingkat perekonomian menengah atau kurang, cenderung menjadikan jumlah pendapatan yang mereka peroleh sebagai bagian dari kualitas hidup mereka. Pendapatan yang diperoleh dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia. Kualitas hidup merupakan standar kualitas yang ditetapkan oleh individu dalam upayanya untuk melakukan penilaian atas kesejahteraan yang dimiliki. Hal ini mencakup seluruh aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu [7]. Saat individu tidak merasakan kualitas hidup yang optimal maka mereka akan melakukan upaya yang lebih keras untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas hidup yang optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup yang dimiliki oleh pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup yang dimiliki oleh pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

- 2.1 Mengidentifikasi kesejahteraan yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto
- 2.2 Mengidentifikasi kebebasan yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto
- 2.3 Mengidentifikasi partisipasi sosial yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto

3. Metode

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan desain deskriptif fenomenology untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman hak asasi manusia pada wanita pekerja seksual setelah adanya public policy penutupan lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Partisipan dalam penelitian dipilih dari para wanita pekerja seksual yang pernah berada di lokalisasi balongcangkring kota Mojokerto yang memenuhi kriteria penelitian yaitu : 1) masih menjalankan praktik prostitusi, 2) dapat berkomunikasi dengan baik, 3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan memberikan pernyataan melalui informed consent. Dari hasil pemilihan partisipan didapatkan 16 partisipan yang bersedia untuk dilakukan interview

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun peneliti mengacu kepada dimensi kualitas hidup manusia. Interview dilakukan kepada partisipan penelitian menggunakan panduan wawancara terstruktur. Saat wawancara dilakukan, peneliti juga melakukan pengamatan kepada ekspresi non verbal yang muncul pada saat peneliti mengajukan pertanyaan dan partisipan penelitian memberikan jawaban. Interview dilakukan selama kurun waktu 1 jam hingga 2 jam. Saat wawancara dilakukan, peneliti menyiapkan alat perekam percakapan yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari partisipan penelitian alat perekam dinyalakan dan diletakkan peneliti dengan jarak 40 cm antara peneliti

dengan partisipan penelitian. Lokasi wawancara penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan informan penelitian.

Hasil wawancara yang telah dilakukan selanjutnya diketik ke dalam transkrip kata demi kata dan setelah proses transkrip selesai dilakukan, peneliti bertemu kembali dengan informan penelitian untuk melakukan validasi atas hasil wawancara yang telah dituliskan peneliti. Informan diberikan kesempatan untuk membaca transkrip dan melakukan koreksi atas kata demi kata yang telah dituliskan oleh peneliti

3.4 Ethical consideration

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian AKADEMI KEPERAWATAN Dian Husada Mojokerto (009/KEDH/VII/2019). Ijin melakukan pengumpulan data sudah didapatkan peneliti dari informan penelitian melalui lembar informed consent sebagai bentuk kesediaan berpartisipasi. Informan juga telah dijelaskan mengenai hak untuk menolak berpartisipasi atau mengundurkan diri dari kegiatan penelitian.

3.5 Analisa Data

Data penelitian dilakukan analisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan teori grounded. Peneliti menyusun pertanyaan penelitian berdasarkan tiga konsep kualitas hidup manusia [8]. Setelah kegiatan wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti, peneliti selanjutnya melakukan transkrip atas hasil wawancara. Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan koding atas hasil wawancara yang telah dilakukan untuk kemudian dilakukan penyusunan konsep berdasarkan hasil koding yang telah dilakukan. Konsep yang telah tersusun selanjutnya digunakan peneliti untuk menentukan kategori sehingga hasil wawancara dapat dilakukan analisis.

4. Hasil Penelitian

Hasil analisa data didapatkan tiga dimensi yang berkaitan dengan kualitas hidup manusia yang dianggap bermakna oleh informan dalam penelitian ini yaitu : 1) Kesejahteraan, 2) Kebebasan, dan 3) Partisipasi sosial

4.1. Kesejahteraan

Informan mengungkapkan bahwa kesejahteraan bagi informan merupakan hal terpenting dalam kehidupan mereka. Saat seorang individu tidak mendapatkan kesejahteraan, hal ini dapat diartikan bahwa kualitas hidup yang dimiliki individu tidak dapat dikatakan terpenuhi. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan emosional, kesejahteraan materi dan kesejahteraan fisik.

1) Kesejahteraan emosional

“saya tidak merasa puas terhadap kompensasi yang saya dapatkan sebagai bentuk ganti rugi atas penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto” (Informan Utama 2, 26 tahun)

“skill serta usia yang saya miliki saat ini tidak mendukung saya untuk mampu mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi pekerja seksual” (Informan Utama 3, 35 tahun)

“penutupan lokalisasi menjadikan saya sering stress karena saya merasa kehilangan pekerjaan yang biasa saya lakukan dan tentunya ini berdampak pada perekonomian yang saya miliki” (Informan Utama 7, 28 tahun)

2) Kesejahteraan materi

“saya tidak peduli meskipun lokalisasi ditutup oleh pemerintah Kota Mojokerto, bagi saya bekerja sebagai pekerja seksual adalah cara saya untuk memperoleh uang” (Informan Utama 1, 19 tahun)

“meskipun disiapkan lapangan pekerjaan baru, saya pasti tetap memilih bekerja sebagai pekerja seksual karena pekerjaan yang ringan dan cepat mendapatkan uang” (Informan Utama 4, 24 tahun)

“saya memilih tetap bekerja sebagai pekerja seksual saja karena keinginan saya untuk bisa memiliki rumah masih belum tercapai” (Informan Utama 10, 36 tahun)

3) Kesejahteraan fisik

“saya mengakui bahwa sejak penutupan lokalisasi dilakukan, saya merasa lebih sehat dibandingkan sebelum lokalisasi ditutup oleh pemerintah kota Mojokerto” (Informan Utama 16, 28 tahun)

“setelah lokalisasi ditutup saya memiliki banyak waktu yang bisa saya gunakan bersama dengan keluarga karena untuk melakukan pekerjaan sebagai pekerja seksual tidak perlu untuk berada di lokalisasi, cukup menunggu telepon baru saya langsung berangkat” (Informan Utama 15, 25 tahun)

“saat ini saya bisa melakukan olahraga secara rutin atau pergi liburan ke tempat wisata bersama dengan keluarga karena saya tidak harus berada di lokalisasi selama satu hari penuh” (Informan Utama 9, 23 tahun)

4.2. Kebebasan

Informan mengungkapkan bahwa kebebasan adalah hal terpenting bagi seorang individu. Kebebasan yang dimaksud diantaranya adalah kebebasan untuk melakukan pengembangan pribadi dan penentuan nasib sendiri

1) Pengembangan pribadi

“kalo sudah kerja jadi seorang pekerja seksual, cukup menjalani yang ada dan tidak perlu lagi untuk mencoba hal baru yang belum tentu bermanfaat” (Informan Utama 14, 27 tahun)

“pendidikan yang saya miliki tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan perubahan yang cukup berarti terutama dalam hal pekerjaan” (Informan Utama 15, 25 tahun)

“pada usia seperti saya sekarang ini, untuk belajar sesuatu hal yang baru merupakan upaya yang sangat berat dan tidak mungkin saya lakukan” (Informan Utama 12, 30 tahun)

2) Penentuan nasib sendiri

“sebelum penutupan lokalisasi dilakukan saya bergantung kepada mucikari untuk bisa bekerja sebagai seorang pekerja seksual. Meskipun lokalisasi sudah ditutup, tetapi saya tetap melakukan praktik prostitusi dan saya juga masih tetap bergantung kepada mucikari untuk mendapatkan pelanggan” (Informan Utama 11, 31 tahun)

“untuk menjadi seorang pekerja seksual bukan hal yang mudah karena saya harus membuang jauh norma serta budaya yang selama ini saya anut. Untuk bisa tetap berprofesi sebagai seorang pekerja seksual saya memilih untuk membuang nilai dan budaya yang selama ini saya anut” (Informan Utama 6, 32 tahun)

“jika saya disuruh memilih antara berhenti atau tetap menjadi pekerja seksual, maka saya lebih memilih tetap bekerja sebagai pekerja seksual karena memang saya merasa tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang lain” (Informan Utama 8, 26 tahun)

4.3. Partisipasi sosial

Informan mengungkapkan, partisipasi sosial adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk berperan secara aktif dalam setiap dimensi kehidupan. Partisipasi sosial ini terkait dengan hubungan interpersonal, inklusi sosial dan hak asasi.

1) Hubungan interpersonal

“selama menjadi seorang pekerja seksual, saya hanya menjalin hubungan baru dengan mucikari dan sesama pekerja seksual. Saya tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan orang lain” (Informan Utama 2, 26 tahun)

“terkait dengan profesi saya sebagai seorang pekerja seksual saya tidak pernah sekalipun memberikan informasi mengenai pekerjaan yang saya lakukan termasuk kepada keluarga yang saya miliki” (Informan Utama 4, 24 tahun)

“selama ini saya tidak pernah sekalipun melakukan segala sesuatu yang dapat menjadikan orang lain merasa rugi dan kecewa. Hal ini saya lakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan” (Informan Utama 6, 32 tahun)

“penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sempat memunculkan kegelisahan pada kami para pekerja seksual. Saya selalu berusaha mencoba untuk memberikan dukungan kepada setiap pilihan yang diambil oleh para sesama pekerja seksual, mau berhenti atau tetap menjadi pekerja seksual itu adalah pilihan masing-masing individu” (Informan Utama 8, 26 tahun)

“jika terjadi permasalahan baik dengan mucikari atau sesama pekerja seksual, saya lebih memilih untuk menahan diri karena bagaimanapun juga konflik yang terjadi beresiko terhadap pekerjaan yang saya lakukan” (Informan Utama 10, 36 tahun)

2) Inklusi sosial

“hidup di lingkungan perkotaan itu butuh biaya besar untuk dapat hidup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan, harus bekerja lebih keras lagi. Tidak mungkin mengandalkan penghasilan suami saja” (Informan Utama 4, 24 tahun)

“keinginan untuk bisa diakui dan diterima oleh masyarakat itu selalu ada, namun masyarakat cenderung bersikap negatif kepada setiap pekerja seksual yang ingin berubah. Hal ini menjadikan para pekerja seksual lebih memilih untuk tetap menjalankan praktik prostitusi karena mereka lebih nyaman saat berada diantara sesama pekerja seksual dibandingkan dengan saat berada ditengah masyarakat” (Informan Utama 13, 34 tahun)

3) Hak asasi

“bekerja yang saya bisa adalah kemampuan yang saya miliki, seharusnya pemerintah sadar mengenai hal ini dan tidak menutup lokalisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah sebetulnya membatasi warga negara untuk dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki” (Informan Utama 3, 35 tahun).

“mendapatkan uang dengan mudah dengan cara melakukan pekerjaan apapun selama tidak merugikan pemerintah dan orang lain seharusnya ini menjadi perhatian bagi negara” (Informan Utama 8, 26 tahun)

“selama masyarakat dapat bekerja, mampu mendapatkan uang dan tidak menjadikan beban bagi negara, seharusnya negara mau memperhatikan

hal ini dan tidak melakukan penutupan lokalisasi” (Informan Utama 13, 34 tahun)

5. Pembahasan

Penelitian ini mengidentifikasi tiga domain yang menjadi bagian dari kualitas hidup pada pekerja seksual yaitu kesejahteraan, kebebasan dan partisipasi sosial.

5.1. Kesejahteraan yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto

Kesejahteraan merupakan salah satu domain penting dalam hidup manusia. Informan mengungkapkan bahwa penutupan lokalisasi balongcangkring yang dilakukan pemerintah pada awalnya sangat berpengaruh terhadap kondisi sejahtera yang informan miliki. Penutupan lokalisasi menjadikan informan kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan guna mendapatkan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai upaya untuk tetap bisa mendapatkan kesejahteraan, informan memutuskan untuk tetap melakukan praktik prostitusi meskipun sudah ada larangan yang dikeluarkan pemerintah Kota Mojokerto terkait praktik prostitusi di wilayah Kota Mojokerto.

Kesejahteraan hidup merupakan kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, mampu untuk membuat keputusan sendiri, dapat mengendalikan perilaku yang dimiliki, mampu menciptakan dan mengatur lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup menjadi bermakna serta selalu berupaya untuk melakukan eksplorasi terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki guna pengembangan diri [9]. Schalock mengemukakan domain kesejahteraan materi terdiri dari tiga komponen utama yaitu status ekonomi, pekerjaan, dan kepemilikan rumah [8].

Domain pertama dari kesejahteraan adalah kesejahteraan emosional. Informan mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan penutupan lokalisasi balongcangkring menjadikan informan tidak merasa puas. Ketidakpuasan yang dialami informan menurut pengakuan informan karena kompensasi yang diberikan kepada informan sebagai ganti rugi penutupan lokalisasi balongcangkring tidak sesuai dengan harapan informan. Informan menambahkan informasi bahwasanya informan memiliki harapan kompensasi yang diberikan pemerintah akan dapat digunakan oleh informan untuk membuka usaha atau melakukan entrepreneurship. Namun kompensasi yang didapatkan oleh informan tidak sesuai dengan harapan sehingga menjadikan informan mengalami ketidakpuasan atas penutupan lokalisasi.

Selain ketidakpuasan yang dialami oleh informan, informan menambahkan informasi bahwa penutupan lokalisasi juga memiliki dampak bagi konsep diri yang dimiliki oleh informan. Menurut pengakuan informan, keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki menjadikan mereka tidak mampu untuk melakukan penyesuaian diri dengan keputusan penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Informan menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto tidak sesuai dengan harapan informan. Informan tidak mampu untuk mengaplikasikan kegiatan pelatihan yang telah diberikan. Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto pada dasarnya bertujuan agar para pekerja seksual mampu berdaya dan memiliki motivasi untuk berhenti menjalankan praktik prostitusi. Namun menurut pengakuan informan, kegiatan

pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki informan sehingga informan lebih memilih untuk tetap melakukan praktik prostitusi. Selain pengetahuan yang kurang memadai, pengharapan yang dimiliki oleh informan juga berpengaruh kepada motivasi informan untuk berhenti menjalankan praktik prostitusi. Menurut pengakuan informan, informan tidak lagi memiliki harapan yang tinggi untuk dapat merubah nasib mereka. Informan mengatakan bahwa usia yang mereka miliki, menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini menjadikan informan tidak lagi memikirkan mengenai mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang lebih layak untuk informan lakukan dan tetap melakukan praktik prostitusi.

Domain selanjutnya dari kesejahteraan adalah kesejahteraan materi. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan didapatkan bahwa tiga poin penting yang menjadi komponen utama dari kesejahteraan materi adalah status ekonomi, pekerjaan dan status kepemilikan tempat tinggal. Menurut pengakuan informan, alasan informan tetap melakukan praktik prostitusi karena informan memiliki status ekonomi yang kurang. Pendapatan yang dimiliki oleh pasangan informan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan informan dan keluarganya. Informan tidak mungkin menuntut lebih kepada pasangannya agar bekerja lebih keras untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kondisi ini, menjadikan informan memutuskan untuk tetap melakukan praktik prostitusi meskipun sudah ada public policy penutupan lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto. Informan memilih tetap menjadi seorang pekerja seksual karena keterbatasan akses pekerjaan yang dapat dilakukan oleh informan. Informan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki gaji yang cukup besar adalah hal yang sulit untuk dilakukan terutama karena keterbatasan pendidikan yang pernah ditempuh oleh informan serta usia yang dimiliki oleh informan. Rerata pekerjaan yang tersedia mensyaratkan latar belakang pendidikan yang tinggi dan usia yang dimiliki masih dalam kategori usia muda. Informan menambahkan informasi bahwa dirinya tidak memiliki kedua syarat tersebut sehingga menjadikan informan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang memadai. Berdasarkan fakta ini, informan lebih cenderung untuk tetap melakukan praktik prostitusi dibandingkan harus berhenti menjadi seorang pekerja seksual dan berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Selain status ekonomi dan pekerjaan, kepemilikan tempat tinggal juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan yang dimiliki informan. Menurut pengakuan informan status kepemilikan rumah merupakan alasan bagi informan untuk tetap melakukan praktik prostitusi. Informan menuturkan bahwa hidup diwilayah perkotaan adalah suatu tantangan. Untuk berpindah dari lingkungan perkotaan dan beralih ke lingkungan yang memiliki biaya hidup lebih rendah adalah hal yang tidak mungkin dilakukan informan mengingat untuk melakukan hal tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Informan memutuskan untuk tetap menjadi pekerja seksual karena tingginya kebutuhan hidup yang harus informan penuhi dan beberapa informan mengatakan bahwa mereka menginginkan untuk bisa memiliki rumah yang lebih besar dari rumah yang mereka miliki saat ini sehingga memutuskan untuk tetap melakukan praktik prostitusi.

Domain terakhir dari kesejahteraan adalah kesejahteraan fisik. Kesejahteraan fisik ditandai dengan adanya kondisi fisik yang optimal

sehingga individu mampu untuk mengoptimalkan setiap potensi diri yang dimiliki. Kesejahteraan fisik terbentuk dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, aktivitas rutin dan aktivitas fisik [8]. Saat individu mampu memenuhi setiap domain dari kesehatan fisik maka disaat itu pula dapat dikatakan bahwa individu memiliki kesejahteraan fisik yang optimal.

Menurut pengakuan informan, penutupan lokalisasi balongcangkring yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto membawa dampak dan pengaruh bagi perilaku yang dimiliki oleh informan. Sejak lokalisasi balongcangkring ditutup, informan merasakan terjadi peningkatan kesehatan pada dirinya. Beberapa gangguan kesehatan seperti nyeri, capek ataupun gangguan kesehatan lain yang sering informan rasakan sebelum lokalisasi ditutup, sudah tidak lagi sering dialami oleh informan. Penurunan intensitas gangguan yang dialami informan dimungkinkan terjadi karena informan setelah lokalisasi dilakukan penutupan, memiliki banyak waktu untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang yang dimiliki untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kesehatannya. Informan juga mengakui bahwa penutupan lokalisasi menjadikan informan mampu melakukan aktivitas rutin yang harus informan lakukan setiap harinya seperti mengerjakan urusan rumah tangga atau merawat anggota keluarga yang dimiliki informan. Informan juga mengungkapkan bahwa informan memiliki waktu untuk sekedar olahraga pagi atau pergi ke tempat wisata bersama dengan keluarga saat hari libur. Hal ini membuktikan bahwa penutupan lokalisasi balongcangkring memiliki pengaruh yang positif terhadap kondisi kesejahteraan fisik yang dimiliki informan.

5.2. Kebebasan yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto

Kebebasan merupakan keadaan dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap dirinya. Penutupan lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar para pekerja seksual yang selama ini berada di lokalisasi balongcangkring dapat keluar dan terbebas dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh mucikari atau pihak yang diuntungkan akibat adanya praktik prostitusi. Kebebasan yang dimiliki oleh individu dapat dilakukan identifikasi melalui dua domain utama pembentuk kebebasan yaitu pengembangan pribadi dan penentuan nasib sendiri [8].

Domain pertama dari kebebasan adalah pengembangan pribadi. Informan mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang menjadikan informan tidak mampu untuk meninggalkan praktik prostitusi adalah latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh informan. Menurut informan, pendidikan rendah yang dimiliki informan menjadikan informan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak. Selain itu, pendidikan yang rendah menjadikan informan kesulitan dalam mengadopsi informasi baru yang mereka terima sehingga informan tidak memiliki motivasi untuk mampu berubah dan meninggalkan praktik prostitusi. Selain pendidikan, kompetensi pribadi yang dimiliki oleh informan membuat informan merasa enggan untuk meninggalkan praktik prostitusi. Informan mengungkapkan bahwa selama berada di lokalisasi informan tidak pernah sekalipun untuk melakukan sesuatu hal yang baru seperti mengikuti pelatihan atau mencoba untuk melakukan wirausaha. Bagi informan, dapat bekerja sebagai seorang pekerja seksual adalah kompetensi yang mereka miliki. Untuk bekerja selain menjadi seorang pekerja seksual adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh informan. Informan menjadikan jumlah pendapatan yang mereka peroleh dengan bekerja di sektor lain

dibandingkan menjadi seorang pekerja seksual sangat jauh berbeda, dan cenderung lebih besar jumlah uang yang bisa informan dapatkan saat melakukan praktik prostitusi. Hal ini yang mendasari informan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan kompetensi pribadi.

Domain kedua dari kebebasan adalah penentuan nasib sendiri. Informan penelitian mengungkapkan bahwa setelah lokalisasi balongcangkring ditutup oleh pemerintah Kota Mojokerto, informan tetap melakukan praktik prostitusi. Informan merasa bahwa dirinya tidak memiliki kontrol pribadi karena informan masih harus mengikuti setiap perintah yang diberikan oleh mucikari mereka. Informan dalam melakukan praktik prostitusi tidak diberikan kesempatan untuk dapat menolak pelanggan jasa mereka yang telah melakukan kesepakatan dengan mucikari yang informan miliki. Apapun model pelanggan mereka, informan harus tetap melayani. Jika informan menolak untuk melayani pelanggan, maka informan masih harus tetap membayarkan sejumlah uang kepada mucikari mereka sebagai ganti atas penolakan melayani pelanggan yang telah didapatkan oleh mucikari. Informan juga menambahkan, dalam melakukan praktik prostitusi informan harus membuang jauh budaya yang selama ini informan pegang teguh. Dalam masyarakat Indonesia berlaku adat dan budaya ketimuran dimana dalam adat dan budaya ini mengatur mengenai norma dalam berkehidupan. Informan harus melayani dan tidur dengan laki-laki yang bukan suami mereka serta harus melayani setiap permintaan dari pelanggan tersebut tanpa ada kesempatan untuk menolak dan protes.

Bekerja sebagai pekerja seksual maka individu sama artinya dengan memutuskan untuk membuang jauh rasa jijik dan malu untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bukan suami mereka. Mereka juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan agar pelanggan mereka puas dan kembali untuk memanfaatkan jasa mereka kembali. Selain kedua hal tersebut, informan juga mengungkapkan bahwa dalam keputusan informan untuk tetap melakukan praktik prostitusi setelah lokalisasi balongcangkring ditutup oleh pemerintah Kota Mojokerto karena informan tidak memiliki pilihan yang dapat mereka ambil. Menurut informan, pilihan yang tersedia bagi mereka adalah tetap bekerja sebagai pekerja seksual dengan mengikuti segala aturan serta syarat yang berlaku didalamnya untuk bisa mendapatkan uang atau berhenti menjadi seorang pekerja seksual dan memiliki resiko untuk tidak bisa mendapatkan uang yang dapat berakibat pada terganggunya perekonomian keluarga informan. Berdasarkan pilihan ini, informan akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan praktik prostitusi. Informan memilih keputusan ini karena informan tidak ingin dirinya tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang dapat mereka gunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau dalam kalimat lugasnya bisa disebut, informan cenderung menyerah dan lebih menerima kepada nasib mereka sendiri.

5.3. Partisipasi sosial yang dimiliki pekerja seksual setelah lokalisasi balongcangkring dilakukan penutupan oleh pemerintah Kota Mojokerto

Partisipasi sosial merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seorang individu dengan tujuan pencapaian kualitas hidup yang optimal. Partisipasi sosial yang dimiliki individu sebagai bagian dari kualitas hidup memiliki tiga domain utama yaitu hubungan interpersonal, inklusi sosial dan hak asasi [8].

Domain pertama dari partisipasi sosial adalah hubungan interpersonal. Informan penelitian mengungkapkan bahwa menjadi seorang pekerja seksual

berarti harus memiliki hubungan interpersonal yang baik. Menurut informan penelitian hal ini bertujuan agar identitas pekerjaan yang dilakukan oleh informan penelitian sebagai pekerja seksual tidak diketahui orang lain termasuk oleh anggota keluarga yang dimiliki oleh informan penelitian. Hubungan interpersonal memiliki lima domain utama yaitu 1) memprakarsai hubungan, 2) pengungkapan diri, 3) menyatakan ketidaksenangan dengan tindakan orang lain, 4) memberikan dukungan emosional, dan 5) mengelola konflik antar pribadi [12]. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dapat disimpulkan bahwa kecenderungan hubungan interpersonal yang dimiliki oleh informan dalam kondisi negatif. Hal ini ditandai dengan adanya sikap tertutup yang dimiliki oleh informan. Informan mengungkapkan bahwa dirinya tidak berusaha untuk menjalin hubungan lebih dari yang dibutuhkan terutama dengan orang lain. Informan lebih memilih untuk dekat dengan sesama pekerja seksual atau dengan mucikari dibandingkan dekat dengan orang lain yang tidak dikenal oleh informan. Hal ini merupakan suatu kewajaran mengingat aktivitas prostitusi yang dilakukan oleh informan penelitian merupakan hal yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi informan untuk tidak mengungkapkan jati diri yang dimilikinya kepada sembarang orang. Informan penelitian tidak menginginkan adanya orang lain yang tahu mengenai aktivitas yang mereka lakukan. Saat orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh informan penelitian, mereka cenderung menganggap hal tersebut bukan urusan mereka dan tidak perlu untuk ditanggapi. Informan tidak mau terlibat lebih jauh dengan urusan orang lain karena adanya ketakutan yang dialami oleh informan. Informan menganggap jika dirinya ikut campur terhadap suatu urusan maka akan menjadikan orang lain tersinggung. Saat orang lain tersinggung maka orang ini dikhawatirkan akan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal negatif yang dimiliki oleh informan untuk selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan informan.

Terkait dengan dukungan emosional, informan penelitian mengungkapkan bahwa selama ini dukungan emosional hanya diberikan informan kepada keluarga dan sesama pekerja seksual. Bagi menjelaskan bahwa penting bagi dirinya untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama pekerja seksual dan mucikari yang selama ini selalu membantu informan dalam mendapatkan pelanggan yang menggunakan jasa informan. Tanpa adanya hubungan yang baik dapat dipastikan informan akan mengalami kesulitan dalam melakukan praktik prostitusi setelah lokalisasi balongcangkring ditutup oleh pemerintah Kota Mojokerto. selain menjalin hubungan yang baik dan memberikan dukungan emosional, informan menambahkan bahwa dirinya juga harus mampu untuk mengendalikan diri agar tidak terjadi konflik dengan orang lain mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh informan tidak boleh diketahui oleh orang lain dan membutuhkan adanya hubungan yang baik antara informan dengan sesama pekerja seksual dan informan dengan mucikari.

Domain kedua dari partisipasi sosial adalah inklusi sosial. Inklusi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan martabat dan kemandirian dari individu tersebut untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Inklusi sosial merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan individu untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kehidupan sosial di masyarakat [13]. Domain inklusi sosial terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi budaya [8]. Informan mengungkapkan bahwa kebutuhan pemenuhan

perekonomian merupakan alasan paling mendasar yang digunakan sebagai pembenaran bagi informan untuk tetap melakukan praktik prostitusi meskipun sudah ada public policy penutupan lokalisasi balongcangkring dan pelarangan terjadinya praktik prostitusi. Informan mengemukakan bahwa kebutuhan perekonomian yang informan butuhkan cenderung tinggi mengingat selama ini informan hidup dan berada di kawasan perkotaan serta menerapkan pola hidup konsumtif. Keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh pasangan informan, memaksa informan harus ambil bagian dalam upaya untuk memenuhi setiap kebutuhan perekonomian dalam keluarga. Informan tidak mungkin untuk memaksa pasangan mereka untuk bekerja lebih keras dan mendapatkan uang lebih banyak. Akhirnya informan memutuskan untuk tetap melakukan praktik prostitusi. Selain alasan ekonomi, informan memutuskan untuk tetap bekerja sebagai pekerja seksual karena informan merasa tidak diterima kehadirannya di masyarakat. Informan menuturkan bahwa masyarakat di Indonesia seringkali takut dan menolak adanya seorang pekerja seksual yang berada di lingkungan mereka. Masyarakat menolak kehadiran seorang pekerja seksual meskipun pekerja seksual tersebut ingin berubah dan berhenti dari pekerjaan yang selama ini mereka jalani. Masyarakat takut jika ada pekerja seksual atau mantan pekerja seksual berada di lingkungan tempat tinggal mereka akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Yang paling ditakutkan adalah suami mereka akan mencoba untuk mendekati para pekerja seksual tersebut dan akhirnya terjadi perselingkuhan.

Domain terakhir dari partisipasi sosial adalah hak asasi. Menurut pengakuan informan, penutupan lokalisasi balongcangkring yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto, informan anggap melanggar hak asasi yang dimiliki informan untuk bisa bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki, mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian informan dan keluarganya. Informan penelitian juga menambahkan bahwa penutupan lokalisasi juga menghilangkan kesempatan informan untuk meningkatkan kondisi kesehatan yang dimiliki informan dan keluarganya. Hal ini berhubungan dengan pembiayaan kesehatan yang dapat diupayakan oleh informan dengan bekerja sebagai seorang pekerja seksual. Penutupan lokalisasi juga diartikan sebagai upaya menghilangkan kesempatan yang dimiliki oleh anggota keluarga informan untuk bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak karena penutupan lokalisasi menghilangkan pekerjaan yang dimiliki oleh informan.

Hak asasi manusia merupakan salah satu topik bahasan yang saat ini menjadi salah satu bahasan pada World Health Organization. Konstitusi WHO mengembangkan konsep bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hal ini juga dapat diartikan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan agar setiap warga negara mampu memiliki akses kepada pelayanan kesehatan, mampu menjangkau pusat pelayanan kesehatan, dapat memanfaatkan pusat pelayanan kesehatan, serta memiliki peluang untuk mengupayakan derajat kesehatan yang tinggi dengan cara memodifikasi faktor penentu kesehatan bagi masyarakat seperti air yang layak untuk diminum, sanitasi, ketersediaan makanan, ketersediaan perumahan, hak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan, kesetaraan gender dan kesempatan untuk bisa memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya [11].

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat yang hidup di dunia. Hak asasi juga merupakan salah satu dari

sekian banyak standar hak asasi manusia yang disepakati oleh para pemimpin dunia dan tidak dapat dipisahkan dari hak lain yang dimiliki oleh seorang manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai hak atas kesehatan, merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penutupan lokalisasi. Menurut kajian ilmiah yang telah banyak dilakukan, praktik prostitusi yang terjadi seringkali menimbulkan dampak negatif terutama bagi pekerja seksual itu sendiri dan masyarakat yang berinteraksi dengan praktik prostitusi. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah [14], didapatkan bahwa praktik prostitusi pada dasarnya adalah upaya eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada para pekerja seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan eksploitasi tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh pekerja seksual cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pihak lain yang selama ini diuntungkan akibat adanya praktik prostitusi yang terjadi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk melakukan penutupan lokalisasi pada dasarnya bertujuan agar setiap pekerja seksual dapat memiliki kembali hak asasi yang selama ini mereka lupakan. Pemerintah juga menginginkan adanya suasana lingkungan di masyarakat yang kondusif serta mencegah terjadinya tindak kejahatan akibat adanya lokalisasi di masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi prostitusi. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Prostitusi tidak lagi terjadi di lokalisasi namun terjadi secara sembunyi-sembunyi. Transaksi untuk prostitusi juga mengalami perubahan yang sebelum lokalisasi ditutup dilakukan secara konvensional, saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi yang berkembang atau lebih dikenal dengan istilah prostitusi online.

Masih maraknya prostitusi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan sejumlah uang dari praktik prostitusi. Untuk dapat menekan dan menghilangkan praktik prostitusi yang terjadi, pemerintah harus mengambil langkah konkrit dengan cara menggantikan bisnis prostitusi dengan bisnis yang hampir serupa. Pemerintah harus mengupayakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh para pekerja seksual. Saat ini yang terjadi di lapangan, para pekerja seksual cenderung tidak memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak yang bisa mereka akses. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki para pekerja seksual seringkali menjadi hambatan bagi para pekerja seksual yang ingin berhenti dari praktik prostitusi. Rerata pekerjaan yang tersedia mensyaratkan adanya latar belakang pendidikan yang tinggi. Hal ini cenderung tidak mungkin dipenuhi oleh para pekerja seksual sehingga mereka lebih memilih bertahan dan tetap melakukan praktik prostitusi. Selain keterbatasan pendidikan, kurangnya pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja seksual menjadikan mereka ditolak saat mencoba untuk bekerja selain menjadi pekerja seksual. Pengalaman bekerja sebelumnya terkadang menjadi penghambat keinginan yang dimiliki oleh pekerja seksual untuk dapat bekerja lebih layak. Untuk memastikan praktik prostitusi tidak terjadi kembali, maka pemerintah Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatasi hal ini. Penutupan lokalisasi dapat diartikan dengan menghilangkan kesenangan yang dapat diakses oleh masyarakat, maka pemerintah bertanggungjawab untuk menggantikan kesenangan yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut. Relokasi adalah salah satu dari sekian

banyak solusi yang dapat dilakukan. Namun yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap pekerja seksual dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak adalah prioritas utama yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah jika menginginkan praktik prostitusi tidak lagi marak terjadi baik secara konvensional maupun menggunakan metode prostitusi online.

6. Kesimpulan

Penutupan lokalisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap penduduknya dapat hidup sehat dan memiliki kualitas hidup yang optimal. Namun untuk menghilangkan praktik prostitusi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan upaya dan kerja yang lebih keras dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa praktik prostitusi tidak lagi terjadi di Indonesia. Kajian lebih dalam masih perlu untuk dilakukan terutama kajian yang berfokus pada pekerja seksual karena kunci dari lokalisasi adalah pekerja seksual itu sendiri. Saat pekerja seksual merasa memiliki kualitas hidup optimal yang mereka dapatkan bukan dari praktik prostitusi, maka dapat dipastikan para pekerja seksual akan lebih memilih untuk tidak melakukan praktik prostitusi kembali.

7. Acknowledgement

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi terkait makalah penelitian ini

Daftar Pustaka

1. Putri, S. R. Pengaruh Perilaku WPS Dalam Pencarian Pengobatan PMS, Lingkungan Dan Status Kesehatan Terhadap Kualitas Hidup WPS Di Kelurahan Dadap Tangerang Tahun 2011. (2016) : CICES, 2(1), 55-65.
2. World Health Organization. Oral health surveys: basic methods. World Health Organization. (2013).
3. Nurchandani, P. S. Evaluasi Promosi Kesehatan Pada Komunitas Pekerja Seks Komersial (Studi Evaluasi Promosi Kesehatan Klinik Infeksi Menular Seksual Puskesmas Baturraden II Kabupaten Banyumas) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). (2013).
4. Issabela, N. dan Hendriani, W. Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari. Jurnal Insan. (2010) : 12(03).
5. Sukei. Jatim Telah Tuntaskan Penutupan Lokalisasi. (2016). Diakses dari : <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/jatim-telah-tuntaskan-penutupan-lokalisasi>
6. Fathonah, R. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak. Jurnal Poenale, (2016) : 3(4).
7. Capiro, C. M., Sit, C. H., & Abernethy, B. Physical well-being. Encyclopedia of quality of life and well-being research. (2014) : 4805-4807
8. Schalock, R. L., Verdugo, M. A., Gomez, L. E., & Reinders, H. S. Moving us toward a theory of individual quality of life. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. (2016) :121(1), 1-12.
9. Diener, E., Diener, M., & Diener, C. Factors predicting the subjective well-being of nations. In Culture and well-being. (2009) : (pp. 43-70). Springer, Dordrecht.
10. Fayers, P. M., & Machin, D. Quality of life: the assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. (2013) : John Wiley & Sons.

11. World Health Organization. "Sexual Health And Its Linkages To Reproductive Health: An Operational Approach." (2017).
12. Buhrmester, D., Furman, W., Wittenberg, M. T., & Reis, H. T. (1988). Five domains of interpersonal competence in peer relationships. *Journal of Personality and Social psychology*. (1988) : 55(6), 991.
13. Karangora, M. L. B., Yudiarso, A., & Mazdafiah, S. Y. Hubungan Antara dukungan sosial dan kualitas hidup pada lesbian di Surabaya. *Calyptra*. (2012) : 1(1), 1-9.
14. Miftah, M. Rekonstruksi Dimensi Transendental dan Sosial Generasi "Z" Masyarakat Gunung Kemukus Sragen Pasca Penutupan Lokalisasi. *Jurnal Penelitian*. (2018) : 12(2).